



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Ratna No. 19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar

Pos-el : kantorwilayahditjenpasbali@gmail.com

Nomor : WP.20–PR.04.01-15 09 Juli 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.1-PR.01.01-59 tanggal 06 Juli 2026 hal Permintaan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Triwulan II Tahun 2026.

Demikian disampaikan, atas arahan dan petunjuknya lebih lanjut diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah



Andi Wijaya Rivai

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

TRIWULAN II

TAHUN 2026



ANDI WIJAYA RIVAI

KEPALA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, sekaligus sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2026.

Selain sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.



Denpasar, 08 Juli 2026
Kepala Kantor Wilayah,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Andi Wijaya Rivai



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Visi, Misi, dan Mandat Strategis Kementerian	3
1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
1.5 Maksud dan Tujuan	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan	15
BAB III	20
CAPAIAN KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
A. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	25
B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	37
3.2 Capaian Program Aksi	53
3.3 Capaian Kinerja Lainnya	84
3.4 Penghargaan/ Prestasi dan Inovasi	87
BAB IV	89
PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran	90
LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kinerja Triwulan II Tahun 2026	vi
Tabel 2 Capaian Sasaran Kegiatan I pada Sektor Pemasarakatan	viii
Tabel 3 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026.....	x
Tabel 4 Rincian Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026	x
Tabel 5 Nilai IKPA Bulan Juni 2026	xi
Tabel 6 Nilai Bappenas Bulan Juni 2026.....	xii
Tabel 7 Nilai Smart Bulan Juni 2026	xii
Tabel 1. 1 Jumlah SDM yang terdapat pada seluruh Satker	7
Tabel 2. 1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026	14
Tabel 2. 2 Strategi Pelaksanaan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan ..	17
Tabel 3. 1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Triwulan II 2026	21
Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026.....	22
Tabel 3. 3 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026.....	23
Tabel 3. 4 Nilai IKPA Bulan Juni 2026.....	23
Tabel 3. 5 Nilai Bappenas Bulan Juni 2026.....	24
Tabel 3. 6 Nilai Smart Bulan Juni 2026	24
Tabel 3. 7 Tabel capaian kinerja Unit pelaksana teknis Triwulan II Tahun 2026	26
Tabel 3. 8 Tabel Instrumen Perhitungan Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (IKK 17.1).....	27
Tabel 3. 9 Tabel Indeks IKK.17.1 Kantor Wilayah Tahun 2026	28
Tabel 3. 10 Indeks IKK.17.1 Kantor Wilayah Tahun 2026.....	32
Tabel 3. 11 Indeks IKK.17.1 Kantor Wilayah Tahun 2026.....	33
Tabel 3. 12 Jumlah Pemenuhan Data Dukung RB Triwulan II Tahun 2026	38
Tabel 3. 13 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2026 di Lingkup Kewilayahan	40
Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	40
Tabel 3. 15 Perbandingan Target Jangka Menengah Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	41
Tabel 3. 16 Tabel Survei Kesekretariatan Trwiulan II Tahun 2026.....	46
Tabel 3. 17 Tabel Indeks Kepuasan Unit Kerja	48
Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	48
Tabel 3. 19 Perbandingan Target Jangka Menengah Indeks Kepuasan Unit Kerja Triwulan II Tahun 2026.....	49
Tabel 3. 20 Kegiatan Program Aksi Satuan Kerja	56
Tabel 3. 21 Pelaksanaan Program Aksi di 13 UPT Pemasarakatan Bali.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024	7
Gambar 3. 1 Dashboard STAR-Proaksi Penetapan Program Aksi	55
Gambar 3. 2 Dashboard konsolidasi penetapan Program Aksi	79



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan sumber daya, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target kinerja tahunan.

Pada Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali melaksanakan dua sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dan Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan. Kedua sasaran tersebut diwujudkan melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT), penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, pengelolaan risiko, pengendalian intern pemerintah, serta implementasi Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1 Data Kinerja Triwulan II Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,4 Indeks	4,28	125,8%
2	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di	100%	100%	100%



		Lingkup Kewilayahan			
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing- masing	3,52 Indeks	3,94	111,9%

1. Capaian sasaran kegiatan I: Terwujudnya pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah, capaian tercermin melalui pengeloan layanan pembinaan dan pengamanan warga binaan, pemberian hak integrasi, peningkatan layanan kesehatan, penguatan keamanan lapas/rutan, serta pembimbingan klien pemasyarakatan.

Pada Sasaran Kegiatan "Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah", indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah memperoleh realisasi sebesar 4,28 dari target 3,4 atau mencapai 125,8% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berada pada kategori **sangat baik**, yang tercermin dari tercapainya seluruh indikator kinerja serta adanya indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini menjadi modal penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada Triwulan selanjutnya di Tahun 2026.



Tabel 2 Capaian Sasaran Kegiatan I pada Sektor Pemasyarakatan

Sektor Pemasyarakatan	Capaian Triwulan II Tahun 2026
Pengelolaan Penghuni Pemasyarakatan	4.784 orang
Program integrasi sosial	311 Pembebasan Bersyarat (PB), 111 Cuti Bersyarat (CB), dan 0 Cuti Menjelang Bebas (CMB)
Pemberian Remisi	2756 Warga Binaan
Pengelolaan Klinik Pemasyarakatan	11 Klinik yang sudah berizin
Penggeledahan blok hunian	396 Kegiatan
Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	548 Klien

Capaian tersebut menunjukkan fungsi pelayanan publik, penegakan hukum, pembinaan, dan perlindungan Masyarakat tetap berjalan efektif, adaptif, dan berkesinambungan.

2. Capaian sasaran kegiatan II: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan, indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan berhasil mencapai target sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi reformasi birokrasi yang direncanakan pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selain itu, indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing memperoleh realisasi sebesar 3,94 dari target 3,52 atau mencapai 111,9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan kesekretariatan yang diberikan kepada unit kerja telah memenuhi harapan pengguna layanan dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berada pada kategori **sangat baik**, yang tercermin dari tercapainya seluruh indikator kinerja serta adanya indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini menjadi modal penting untuk mempertahankan dan



meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada Triwulan selanjutnya di Tahun 2026.

3. Implementasi 15 Program Aksi Menteri Tahun 2026 sebagai percepatan agenda strategis kementerian, implementasi 15 Program Aksi telah berjalan pada Triwulan II, antara lain:

a. Bidang keimigrasian

- 1) penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
- 2) penguatan pemeriksaan di tpi dan autogate;
- 3) penyederhanaan visa bisnis, Golden Visa, dan izin tinggal investor;
- 4) program PIMPASA untuk pencegahan TPPO/TPPM; dan
- 5) penguatan sarpras PLBN dan pos lintas batas.

b. Bidang pemasyarakatan

- 1) pemberantasan narkoba dan penipuan di lapas/rutan;
- 2) penanganan overcrowding secara komprehensif;
- 3) program ketahanan pangan di lapas/rutan;
- 4) pembangunan dapur sehat;
- 5) pemasaran produk karya WBP melalui koperasi/UMKM; dan
- 6) pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan.

c. Dukungan Manajemen dan SDM

- 1) efisiensi energi dan pemanfaatan EBT;
 - 2) pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial;
 - 3) fasilitasi rumah ASN KemenIMIPAS; dan
 - 4) peningkatan kompetensi SDM melalui MOOC dan pendidikan vokasi.
- Implementasi program aksi tersebut menunjukkan orientasi kementerian tidak hanya pada layanan inti, tetapi juga kesejahteraan sosial, investasi, ketahanan pangan, modernisasi birokrasi, dan pengembangan SDM.

4. Realisasi Anggaran

DIPA anggaran tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali adalah sebesar Rp. 179.848.899.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) DIPA tersebut tersebar pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sebesar Rp.11.595.070.000,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) (1% dari total), dan 13 Unit



Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rp. 168.253.829.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) (99% dari total), dengan rincian sebaran sebagai pada gambar berikut:

- Realisasi belanja pegawai % (Rp.69.467.162,-) dari pagu sebesar Rp. 115.718.353.000,-;
- Realisasi belanja barang % (Rp.30.023.154.402,-) dari pagu sebesar Rp.64.100.859.000,-;

Tabel 3 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Target	Realisasi	Persentase
179.819.212.000	99.490.316.523	55,3%

Tabel 4 Rincian Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
692106	LPKA KARANGASEM	Rp7,109,910,000	Rp3,852,311,099	Rp3,257,598,901
692442	BAPAS DENPASAR	Rp10,029,863,000	Rp5,431,092,512	Rp4,598,770,488
692443	LAPAS KEROBOKAN	Rp33,808,413,000	Rp17,606,736,859	Rp16,201,676,141
692444	LAPAS SINGARAJA	Rp13,905,227,000	Rp7,941,229,734	Rp5,963,997,266
692445	RUTAN NEGARA	Rp9,894,152,000	Rp5,757,095,215	Rp4,137,056,785
692446	RUTAN KLUNGKUNG	Rp9,238,762,000	Rp5,105,858,498	Rp4,132,903,502
692447	LAPAS TABANAN	Rp14,320,210,000	Rp7,426,108,977	Rp6,894,101,023
692448	RUTAN GIANYAR	Rp11,171,725,000	Rp5,827,702,643	Rp5,344,022,357
692449	RUTAN BANGLI	Rp10,891,963,000	Rp58,499,766,081	-Rp47,607,803,081
692450	LAPAS KARANGASEM	Rp11,250,145,000	Rp6,756,894,730	Rp4,493,250,270
692514	KANWIL DITJENPAS BALI	Rp11,595,070,000	Rp7,822,940,847	Rp3,772,129,153
692536	LPP KEROBOKAN	Rp10,459,267,000	Rp5,969,625,273	Rp4,489,641,727
692701	LAPASTIK BANGLI	Rp21,164,622,000	Rp11,256,154,705	Rp9,908,467,295
692715	BAPAS KARANGASEM	Rp4,979,883,000	Rp2,886,589,350	Rp2,093,293,650



Tabel 5 Nilai IKPA Bulan Juni 2026

Kode Satker	Nama Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
692106	LPKA KARANGASEM	10.00	15.00	19.74	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	99.74
692442	BAPAS DENPASAR	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692443	LAPAS KEROBOKAN	10.00	15.00	19.66	10.00	10.00	9.61	0.00	25.00	99.27
692444	LAPAS SINGARAJA	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692445	RUTAN NEGARA	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692446	RUTAN KLUNGKUNG	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692447	LAPAS TABANAN	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692448	RUTAN GIANJAR	10.00	15.00	19,56	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	99,56
692449	RUTAN BANGLI	10.00	15.00	18,70	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	98,70
692450	LAPAS KARANGASEM	10.00	15.00	19,84	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	99,84
692514	KANWIL DITJENPAS BALI	10.00	13.97	19.83	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	98.8
692536	LPP KEROBOKAN	10.00	14.14	19.55	10.00	10.00	9.97	0.00	25.00	98.67
692701	LAPASTIK BANGLI	10.00	15.00	19.56	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	99.56
692715	BAPAS KARANGASEM	100.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100



Tabel 6 Nilai Bappenas Bulan Juni 2026

Kode Satker	Nama Satker	Kinerja Satker (%)	Status Kelengkapan	Realisasi	
				Anggaran (%)	Pelaksanaan/ Fisik (%)
692106	LPKA KARANGASEM	100	Rp100	60.41	61.25
692442	BAPAS DENPASAR	100	Rp100	58.88	58.50
692443	LAPAS KEROBOKAN	100	Rp100	73.43	74.00
692444	LAPAS SINGARAJA	100	Rp100	67.09	67.10
692445	RUTAN NEGARA	100	Rp100	70.05	57.36
692446	RUTAN KLUNGKUNG	100	Rp100	62.48	64,67
692447	LAPAS TABANAN	100	Rp100	60.82	61.00
692448	RUTAN GIANJAR	100	Rp100	62,19	62,67
692449	RUTAN BANGLI	100	Rp100	68.74	69.00
692450	LAPAS KARANGASEM	100	Rp100	73,56	74,33
692514	KANWIL DITJENPAS BALI	100	Rp100	72.04	60.52
692536	LPP KEROBOKAN	100	Rp100	70.58	68.50
692701	LAPASTIK BANGLI	100	Rp100	76.83	77.00
692715	BAPAS KARANGASEM	100	Rp100	60.95	61.00

Tabel 7 Nilai Smart Bulan Juni 2026

Kode Satker	Nama Satker	Nilai Kinerja	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
692106	LPKA KARANGASEM	-	49.87
692442	BAPAS DENPASAR	-	50.00
692443	LAPAS KEROBOKAN	-	49.64
692444	LAPAS SINGARAJA	-	50.00
692445	RUTAN NEGARA	-	50.00
692446	RUTAN KLUNGKUNG	-	49.52
692447	LAPAS TABANAN	-	50.00
692448	RUTAN GIANJAR	-	99,56
692449	RUTAN BANGLI	-	49.35
692450	LAPAS KARANGASEM	-	49,92
692514	KANWIL DITJENPAS BALI	-	49.40
692536	LPP KEROBOKAN	-	49.34
692701	LAPASTIK BANGLI	-	99,56
692715	BAPAS KARANGASEM	-	50.00



Secara umum, pelaksanaan kinerja sampai dengan Triwulan II menunjukkan hasil yang positif. Berbagai indikator kinerja telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala, penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta koordinasi yang intensif dengan seluruh UPT Pemasyarakatan di Kanwil Ditjenpas Bali. Capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga mutu penyelenggaraan pemasyarakatan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5. Isu Strategis Beberapa isu strategis yang masih memerlukan perhatian pada Triwulan berikutnya antara lain:

- a. potensi penurunan PNPB layanan paspor dan visa;
- b. tingginya tingkat overcrowding pada lapas dan rutan;
- c. percepatan integrasi sistem informasi dan interoperabilitas data;
- d. efisiensi belanja negara dan kualitas belanja;
- e. ancaman TPPO, penyelundupan, dan narkoba;
- f. dampak dinamika geopolitik global terhadap mobilitas internasional; dan
- g. penguatan kelembagaan, proses bisnis, serta regulasi organisasi.

6. Langkah Percepatan Triwulan II

Memasuki Triwulan II Tahun 2026, fokus kebijakan diarahkan pada:

- a. percepatan realisasi anggaran dan peningkatan kualitas belanja;
- b. percepatan capaian target kinerja dan Reformasi Birokrasi periode B06;
- c. penguatan pengawasan keimigrasian dan keamanan UPT Pemasyarakatan;
- d. percepatan implementasi Program Aksi Menteri;
- e. penanganan overcrowding melalui langkah terukur dan kolaboratif;
- f. penguatan dashboard pimpinan berbasis satu data; dan
- g. peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian kepada Presiden Republik Indonesia serta para pemangku kepentingan, Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi atas capaian program dan kegiatan selama periode April sampai dengan Juni 2026.

Memasuki tahun kedua operasional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terus memperkuat tata kelola, konsolidasi organisasi, serta sistem akuntabilitas kinerja. Pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi SAKIP kementerian memperoleh nilai 78,32 dengan predikat BB, yang menjadi dasar peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja pada Tahun 2026.

Pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali pada Triwulan II Tahun 2026 mengacu pada arah pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya penguatan supremasi hukum, reformasi birokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara kelembagaan, pelaksanaan tersebut berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai dasar penetapan sasaran, indikator, target, dan pendanaan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat, 15 Program Aksi Menteri, serta Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan dipantau Kantor Staf Presiden, sehingga kinerja kementerian selaras dengan target pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya selama Triwulan II Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali menghadapi sejumlah isu strategis, antara lain efisiensi belanja pemerintah, percepatan transformasi digital, penguatan sistem pemasyarakatan, penyelesaian aset, serta penyempurnaan regulasi kelembagaan. Di sisi lain, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali tetap menunjukkan peran strategis dalam pelayanan publik, penegakan hukum, dan



stabilitas nasional melalui layanan pemasyarakatan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali merupakan instansi vertikal bertempat di provinsi yang bertanggung langsung kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 1.039 orang yang tersebar di 1 kantor wilayah dan 13 unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai capaian sasaran, efektivitas pelaksanaan program, serta tantangan yang dihadapi selama Triwulan II Tahun 2026, sekaligus menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- f. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-48 Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;



- g. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- h. Perjanjian Kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026.

1.3 Visi, Misi, dan Mandat Strategis Kementerian

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali memiliki visi yang selaras dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 dengan menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak tahanan, anak dan warga binaan.

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- a. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8



Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.
- b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian Dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, Dan Berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

- a. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan;
- b. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.



1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas:

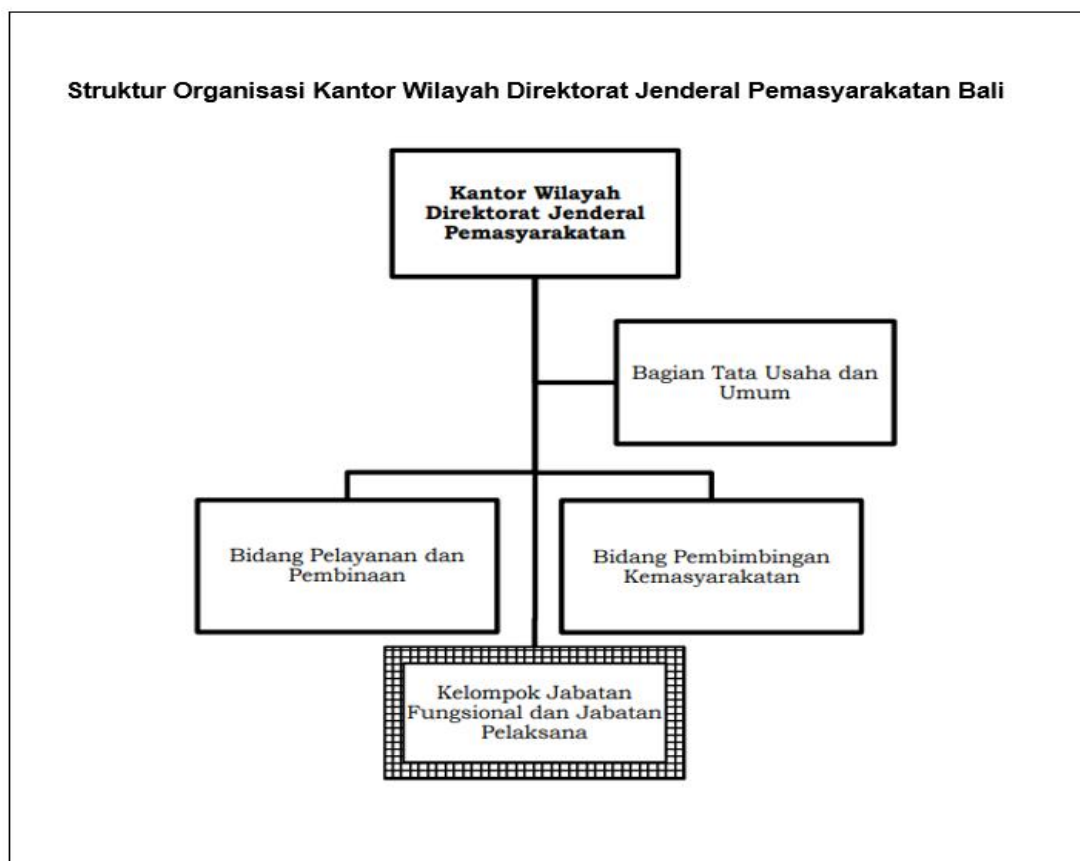
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

1. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
4. pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
5. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali yang merupakan Kantor Wilayah dengan tipe B dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 1.065 orang ASN yang tersebar pada 13 satuan kerja unit pelaksana teknis pemasarakatan, sebagaimana terlampir dalam table di bawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah SDM yang terdapat pada seluruh Satker

No	Satuan Kerja	Alamat	Jumlah SDM
1.	Kantor Wilayah	Jl. Ratna No. 19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	89
2.	Bapas Kelas I Denpasar	Jl. Ken Arok No.4 Denpasar	59
3.	Bapas Kelas II Karangasem	Jalan Serma Natih, Amlapura, Kecamatan / Kabupaten	27



		Karangasem	
4.	Lapas Kelas IIB Karangasem	Jalan Serma Natih No.2 Amlapura	81
5.	Lapas Kelas IIA Kerobokan	Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan – Kuta Utara – Badung,Bali	142
6.	Lapas Kelas IIB Singaraja	Jalan Veteran Nomor 18 Singaraja Bali	83
7.	Lapas Kelas IIB Tabanan	Jalan Gunung Agung No. 21 Tabanan	93
8.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Jalan Purasti, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli	98
9.	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	Jl. Intan Permai Kuta Utara Kerobokan Badung, Bali,	73
10.	LPKA Kelas II Karangasem	Jalan Serma Natih No. 2, Amlapura, Karangasem, Bali	48
11.	Rutan Kelas IIB Bangli	Jalan Merdeka No.95 Bangli	67
12.	Rutan Kelas IIB Gianyar	Jalan Ngurah Rai I/3, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	69
13.	Rutan Kelas IIB Klungkung	Jl. Mawar no.13 Semarapura	69
14.	Rutan Kelas IIB Negara	Jl. Wijaya Kusuma No. 23 Baler Bale Agung, Negara, Kab. Jembrana, Bali	67



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terdiri dari beberapa bagian:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas:

Melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya

Fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik; dan
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
- g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

2. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Tugas:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.



Fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

3. Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan

Tugas:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan kemasyarakatan.



Fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

1.5 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Triwulan II Tahun 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi selama Triwulan II Tahun 2026. Serta memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja, pemanfaatan sumber daya, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.



b. Tujuan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Triwulan II Tahun 2026 bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan informasi capaian kinerja triwulanan yang objektif sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan;
- 2) Mendukung proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan agar tetap selaras dengan perjanjian kinerja tahun 2026;
- 3) Menjadi media pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan atas penggunaan sumber daya dan anggaran yang telah dialokasikan;
- 4) Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun 2026
- 5) Menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada Semester II Tahun 2026 dan periode berikutnya;
- 6) Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Bali.



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

TAHUN 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Renstra memiliki fungsi esensial sebagai acuan dan kerangka kerja dalam penetapan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali. Secara substantif, Renstra menegaskan peran strategis pemasyarakatan dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden untuk periode pemerintahan 2025-2029.

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2026-2029 yaitu:

SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan



Tahun 2025–2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mengampu 2 Sasaran Program dengan 3 Indikator kinerja yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sebagai bentuk penugasan kinerja tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat target indikator strategis yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi, sekaligus menjadi instrumen pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja organisasi. Adapun rincian target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,4 Indeks	4,28	125,8%
2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52 Indeks	3,94	111,9%



2.2 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 serta sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025 yang meliputi:

1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tangga (RT);
7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
9. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
11. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;



13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
14. Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Bali menjalankan tugas dan fungsi sesuai Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025, yaitu :

1. Kepala Kantor Wilayah, untuk:

- a. melakukan pembinaan dan supervisi serta arahan teknis langsung kepada unit pelaksana teknis (UPT);
- b. memfasilitasi, mengonsolidasikan, mengoordinasikan dan membantu UPT mengatasi hambatan dan kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan program aksi;
- c. melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup kewilayahan.

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk:

- a. melakukan persiapan pelaksanaan program aksi dengan membentuk tim sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- b. melaksanakan detail kegiatan dan tahapan program aksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memastikan mekanisme kontrol terhadap tim agar program aksi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tujuan yang ditetapkan;
- d. melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program aksi; dan
- e. melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas.



Sebagai wujud kepatuhan terhadap Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali menetapkan arah kebijakan strategis yang bertumpu pada dua pilar utama:

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan); dan
2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;

Berdasarkan hal tersebut Strategi Pelaksanaan Program Aksi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali diwujudkan melalui:

1. Pilar Penegakan Keamanan: Melakukan monitoring dan evaluasi serta penguatan deteksi dini, sterilisasi alat komunikasi ilegal, peningkatan frekuensi geledah blok, serta kolaborasi aktif bersama TNI/Polri dan BNNP demi mewujudkan Lapas/Rutan yang bersih dari narkoba dan penipuan.
2. Pilar Manajemen Hunian: Melakukan optimalisasi program redistribusi narapidana lintas UPT, percepatan pemberian hak-hak integrasi (PB/CB/CMB) yang transparan, serta penguatan instrumen Asesmen SPPN oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna mengurai kepadatan hunian secara sistemik dan Percepatan dan Transparansi Hak Integrasi.

Tabel 2. 2 Strategi Pelaksanaan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyaratan

No.	Program Aksi	Strategi Pelaksanaan
1	Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;	-
2	Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi(TPI);	-
3	Penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal investor;	-
4	Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk pencegahan TPPO dan TPPM;	-



5	Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya serta penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);	-
6	Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan);	Melakukan monitoring dan evaluasi serta penguatan deteksi dini, sterilisasi alat komunikasi ilegal, peningkatan frekuensi geledah blok, serta kolaborasi aktif bersama TNI/Polri dan BNNP demi mewujudkan Lapas/Rutan yang bersih dari narkoba dan penipuan. Pilar Manajemen Hunian: Melakukan optimalisasi program redistribusi
7	Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;	Melakukan optimalisasi program redistribusi narapidana lintas UPT, percepatan pemberian hak-hak integrasi (PB/CB/CMB) yang transparan, serta penguatan instrumen Asesmen SPPN oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna mengurai kepadatan hunian secara sistemik dan Percepatan dan Transparansi Hak Integrasi.
8	Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);	-
9	Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis;	-



10	Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);	-
11	Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;	-
12	Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;	-
13	Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;	-
14	Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipas; dan	-
15	Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Course (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.	-



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

TAHUN 2026

BAB III CAPAIAN KINERJA





BAB III

CAPAIAN KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pamasarakatan di wilayah Provinsi Bali. Renstra disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun. Melalui Renstra tersebut, sasaran strategis diterjemahkan ke dalam target kinerja, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur sebagai dasar pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja organisasi.

Pada Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen antara Kepala Kantor Wilayah dengan seluruh pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana dalam mewujudkan sasaran strategis organisasi. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Triwulan II merupakan gambaran atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan selama semester pertama Tahun 2026 serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

Meskipun sebagian besar indikator kinerja menunjukkan perkembangan yang positif, capaian pada Triwulan II belum sepenuhnya mencerminkan hasil akhir pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 karena beberapa indikator bersifat tahunan dan memerlukan akumulasi realisasi hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali akan terus memperkuat pengendalian internal, monitoring, evaluasi, serta koordinasi dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Bali guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.



Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mengampu 2 Sasaran Program dan 3 Indikator Sasaran Program yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Triwulan II 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,4 Indeks	4,28	125,8%
2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52 Indeks	3,94	111,9%



Sejalan dengan pengukuran capaian sasaran strategis melalui indikator kinerja utama, evaluasi Triwulan II Tahun 2026 juga menitikberatkan pada aspek dukungan sumber daya, khususnya pengelolaan anggaran kementerian. Kinerja anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, serta agenda reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, selain capaian indikator strategis, perkembangan realisasi belanja dan pemanfaatan pagu anggaran perlu dicermati sebagai bagian integral dari pengukuran kinerja organisasi secara menyeluruh. Adapun gambaran kinerja anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 179.848.899.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) DIPA tersebut tersebar pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sebesar Rp.11.595.070.000,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) (1% dari total), dan 13 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rp. 168.253.829.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) (99% dari total), dengan rincian sebaran sebagai pada gambar berikut:

- Realisasi belanja pegawai % (Rp.69.467.162,-) dari pagu sebesar Rp. 115.718.353.000,-;
- Realisasi belanja barang % (Rp.30.023.154.402,-) dari pagu sebesar Rp.64.100.859.000,-;

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Target	Realisasi	Persentase
179.819.212.000	99.490.316.523	55,3%



Tabel 3. 3 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
692106	LPKA KARANGASEM	Rp7,109,910,000	Rp3,852,311,099	Rp3,257,598,901
692442	BAPAS DENPASAR	Rp10,029,863,000	Rp5,431,092,512	Rp4,598,770,488
692443	LAPAS KEROBOKAN	Rp33,808,413,000	Rp17,606,736,859	Rp16,201,676,141
692444	LAPAS SINGARAJA	Rp13,905,227,000	Rp7,941,229,734	Rp5,963,997,266
692445	RUTAN NEGARA	Rp9,894,152,000	Rp5,757,095,215	Rp4,137,056,785
692446	RUTAN KLUNGKUNG	Rp9,238,762,000	Rp5,105,858,498	Rp4,132,903,502
692447	LAPAS TABANAN	Rp14,320,210,000	Rp7,426,108,977	Rp6,894,101,023
692448	RUTAN GIANJAR	Rp11,171,725,000	Rp5,827,702,643	Rp5,344,022,357
692449	RUTAN BANGLI	Rp10,891,963,000	Rp58,499,766,081	Rp47,607,803,081
692450	LAPAS KARANGASEM	Rp11,250,145,000	Rp6,756,894,730	Rp4,493,250,270
692514	KANWIL DITJENPAS BALI	Rp11,595,070,000	Rp7,822,940,847	Rp3,772,129,153
692536	LPP KEROBOKAN	Rp10,459,267,000	Rp5,969,625,273	Rp4,489,641,727
692701	LAPASTIK BANGLI	Rp21,164,622,000	Rp11,256,154,705	Rp9,908,467,295
692715	BAPAS KARANGASEM	Rp4,979,883,000	Rp2,886,589,350	Rp2,093,293,650

Tabel 3. 4 Nilai IKPA Bulan Juni 2026

Kode Satker	Nama Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
692106	LPKA KARANGASEM	10.00	15.00	19.74	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	99.74
692442	BAPAS DENPASAR	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692443	LAPAS KEROBOKAN	10.00	15.00	19.66	10.00	10.00	9.61	0.00	25.00	99.27
692444	LAPAS SINGARAJA	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692445	RUTAN NEGARA	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692446	RUTAN KLUNGKUNG	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692447	LAPAS TABANAN	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100
692448	RUTAN GIANJAR	10.00	15.00	19.56	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	99.56
692449	RUTAN BANGLI	10.00	15.00	18.70	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	98.70
692450	LAPAS KARANGASEM	10.00	15.00	19.84	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	99.84
692514	KANWIL DITJENPAS BALI	10.00	13.97	19.83	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	98.8
692536	LPP KEROBOKAN	10.00	14.14	19.55	10.00	10.00	9.97	0.00	25.00	98.67
692701	LAPASTIK BANGLI	10.00	15.00	19.56	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	99.56
692715	BAPAS KARANGASEM	100.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100



Tabel 3. 5 Nilai Bappenas Bulan Juni 2026

Kode Satker	Nama Satker	Kinerja Satker (%)	Status Kelengkapan	Realisasi	
				Anggaran (%)	Pelaksanaan/ Fisik (%)
692106	LPKA KARANGASEM	100	Rp100	60.41	61.25
692442	BAPAS DENPASAR	100	Rp100	58.88	58.50
692443	LAPAS KEROBOKAN	100	Rp100	73.43	74.00
692444	LAPAS SINGARAJA	100	Rp100	67.09	67.10
692445	RUTAN NEGARA	100	Rp100	70.05	57.36
692446	RUTAN KLUNGKUNG	100	Rp100	62,48	64,67
692447	LAPAS TABANAN	100	Rp100	60.82	61.00
692448	RUTAN GIANJAR	100	Rp100	62,19	62,67
692449	RUTAN BANGLI	100	Rp100	68.74	69.00
692450	LAPAS KARANGASEM	100	Rp100	73,56	74,33
692514	KANWIL DITJENPAS BALI	100	Rp100	72.04	60.52
692536	LPP KEROBOKAN	100	Rp100	70.58	68.50
692701	LAPASTIK BANGLI	100	Rp100	76.83	77.00
692715	BAPAS KARANGASEM	100	Rp100	60.95	61.00

Tabel 3. 6 Nilai Smart Bulan Juni 2026

Kode Satker	Nama Satker	Nilai Kinerja	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
692106	LPKA KARANGASEM	-	49.87
692442	BAPAS DENPASAR		
692443	LAPAS KEROBOKAN	-	49.64
692444	LAPAS SINGARAJA	-	50.00
692445	RUTAN NEGARA	-	50.00
692446	RUTAN KLUNGKUNG		
692447	LAPAS TABANAN	-	50.00
692448	RUTAN GIANJAR	-	99,56
692449	RUTAN BANGLI	-	49.35
692450	LAPAS KARANGASEM	-	49,92
692514	KANWIL DITJENPAS BALI	-	49.40
692536	LPP KEROBOKAN	-	49.34
692701	LAPASTIK BANGLI	-	99,56
692715	BAPAS KARANGASEM		



Secara umum, pelaksanaan kinerja sampai dengan Triwulan II menunjukkan hasil yang positif. Berbagai indikator kinerja telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala, penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta koordinasi yang intensif dengan seluruh UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali. Capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga mutu penyelenggaraan pemasyarakatan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, uraian capaian kinerja disampaikan berdasarkan masing-masing Sasaran Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan tolak ukur komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana standar kualitas layanan dan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di suatu wilayah telah terpenuhi dan dipertahankan.

1) Capaian

Berdasarkan pada capaian sasaran kegiatan Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dengan indikator kinerjanya yaitu Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. Penilaian mutu dari 13 satuan kerja (yang terdiri dari 2 Bapas, 6 Lapas, 4 Rutan, dan 1 LPKA) diukur melalui dua indikator utama, yaitu jumlah kegiatan yang selesai dan persentase target kinerja yang dicapai. Dari total 142 kegiatan yang direncanakan di seluruh wilayah Bali, jajaran organisasi berhasil menuntaskan 126 kegiatan dengan baik. Selain itu, dari total target persentase kinerja yang ditetapkan sebesar 8.966,5%, seluruh satuan



kerja berhasil berakselerasi hingga mencapai angka riil sebesar 11.225,66%.

Adapun untuk penghitungan Indeks tersebut menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$(PLP)+(PCT) : 25\%$$

$$= (0.4436619718) + (0,6) : 25\% = 4,28$$

Keterangan:

% = Persentase

PLP: Tingkat penyelesaian program/kegiatan tepat waktu (Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana/Total kegiatan) x 50% (Bobot Nilai).

PCT: Persentase pencapaian target kinerja organisasi (Jumlah target kinerja tercapai/Total target kinerja yang ditetapkan) × 50% (Bobot Nilai).

Tabel 3. 7 Tabel capaian kinerja Unit pelaksana teknis Triwulan II Tahun 2026

Satuan Kerja	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026			
	Jumlah IKK yang Selesai		Jumlah Target Kinerja	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Lapastik Bangli	11	11	610.75	893.60
Lapas Perempuan Kerobokan	11	10	610.75	964.15
Lapas Karangasem	11	10	610.75	812.49
Lapas Kelas IIB Tabanan	11	9	610.75	754.76
Lapas Kelas IIA Singaraja	11	9	610.75	846.41
Lapas Kelas IIB Kerobokan	11	10	610.75	937.53
Rutan Bangli	13	11	847.75	1080.96
Rutan Gianyar	13	11	847.75	965.13
Rutan Klungkung	13	11	847.75	1050.58
Rutan Negara	13	12	847.75	1159.67
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem	10	8	606.75	755.15
Bapas Kelas II Karangasem	7	7	380.25	524.94
Bapas Kelas I Denpasar	7	7	380.25	480.25



Pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali sebanyak 13 satuan kerja. Pada capaian kinerjanya untuk periode Triwulan II Tahun 2026, dapat dilihat untuk jumlah Target Kinerja pada Lapas yaitu secara keseluruhan, kinerja 6 Lapas di bawah lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali menunjukkan hasil yang sangat memuaskan karena seluruhnya berhasil melampaui target persentase kinerja yang ditetapkan, yaitu sebesar **610,75%**. Selanjutnya pada Rutan secara keseluruhan capaian kinerja 4 Rutan di bawah lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali menunjukkan hasil yang sangat memuaskan karena seluruhnya berhasil melampaui target persentase kinerja yang ditetapkan, yaitu sebesar **847,75%**. Begitu juga dengan LPKA Karangasem sebagai satu-satunya satuan kerja pembinaan anak di wilayah Bali menunjukkan jumlah target kinerja yang baik yaitu dengan perolehan nilai diatas **606.75%** dan yang terakhir yaitu pada Bapas di bawah lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali, Secara keseluruhan, pada capaian kinerja 2 Bapas di wilayah Bali menunjukkan hasil yang sempurna dan luar biasa karena kedua satker berhasil menuntaskan seluruh rencana kegiatan sekaligus melampaui target persentase kinerja minimal yang ditetapkan sebesar **380,25%**.

Tabel 3. 8 Tabel Instrumen Perhitungan Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (IKK 17.1)

1. PLP

SATKER	JUMLAH IKK	JUMLAH UPT DI WILAYAH	TOTAL IKK	JUMLAH IKK YANG SELESAI SESUAI RENCANA
BAPAS	7	2	14	14
LAPAS	11	6	66	59
RUTAN	13	4	52	45
LPKA	10	1	10	8
RS	0	0	0	
Total Kegiatan				142



Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana	126
NILAI PLP	0.4436619718

2. PCT

SATKER	JUMLAH IKK	JUMLAH TARGET (%)	JUMLAH UPT DI WILAYAH	TOTAL TARGET	JUMLAH TARGET KINERJA TERCAPAI (%)
BAPAS	7	403	2	806	1005.18
LAPAS	11	659	6	3954	5208.94
RUTAN	13	890.25	4	3561	4256.34
LPKA	10	645.5	1	645.5	755.15
RS	0	0		0	
Total target kinerja yang ditetapkan					8966.5
Jumlah target kinerja tercapai					11225.62
NILAI PCT					0.6

Pada Triwulan II Tahun 2026 Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan Bali memperoleh nilai PLP sebesar **0,4436619718** dan nilai PCT sebesar **0,6**.

Tabel 3. 9 Tabel Indeks IKK.17.1 Kantor Wilayah Tahun 2026

SK 17.1 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	3,4%	4,28%	125,8%

Berdasarkan nilai PLP dan PCT yang diperoleh kemudian dimasukan kedalam formulasi penghitungan sehingga menghasilkan nilai Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan di Wilayah sebesar 4,28 dan nilai Capaian Kinerja 125,8%, nilai tersebut lebih besar dari target yang telah ditetapkan pada Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali yakni sebesar 3,4. Berdasarkan data tersebut maka



indeks pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah khususnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jendetal Pemasyarakatan Bali untuk Triwulan II Tahun 2026 dapat dikategorikan sangat baik.

Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan supervisi secara berkala terhadap seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Bali. Selain itu, penguatan koordinasi antara Kantor Wilayah dengan UPT, pelaksanaan pendampingan dalam pemenuhan standar penyelenggaraan pemasyarakatan, serta tindak lanjut yang konsisten atas hasil monitoring dan evaluasi turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Adapun capaian dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Tahanan, Narapidana, dan Anak Binaan

- 1) Jumlah penghuni pemasyarakatan tercatat 4.785 orang, yang terdiri atas tahanan, narapidana, dan anak binaan, sebagai kelompok penerima layanan pembinaan, perawatan, pengamanan, dan pembimbingan secara berkelanjutan;
- 2) Administrasi tahanan tercatat sebanyak 1.007 orang;

b. Pemenuhan hak warga binaan dan reintegrasi sosial

- 1) Program integrasi sosial sebagai instrumen reintegrasi masyarakat telah diberikan kepada warga binaan melalui:
 - Pembebasan Bersyarat : 331
 - Cuti Bersyarat : 111
 - Cuti Menjelang Bebas : -
- 2) Pemberian remisi keagamaan dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku dan pemenuhan hak narapidana, yaitu:
 - Narapidana yang diusulkan Remisi Waisak 2026 berdasarkan besaran perolehan :



- a. RK I: 1 bulan sebanyak 16,2 bulan sebanyak 5,
jadi jumlah RK I sebanyak 27
- b. RK II: 15 hari sebanyak 1 orang
- Narapidana yang diusulkan Remisi Waisak 2026 berdasarkan tindak pidana terkait Pasal 34 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 dan Pasal 34A ayat (1) PP 99 Tahun 2012:
 - a. Narkotika PP NO 99/2012 RK I sebanyak 21
- c. Layanan Kesehatan dan Perlindungan Kelompok Rentan
 - 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mengelola 11 klinik pemasyarakatan, dengan 7 klinik yang mendapatkan akreditasi
 - 2) Pelaksanaan Layanan Kesehatan gratis sebanyak 13 Kali
- d. Pengamanan dan penegakan hukum pemasyarakatan
 - 1) Pengeledahan blok hunian dilaksanakan sebanyak 336 kali, dengan temuan barang terlarang berupa senjata tajam, sebagai bagian dari zero halinar dan deteksi dini gangguan keamanan.
 - 2) Tes urine dilaksanakan secara berkala sebanyak 34 kali, meliputi:
 - 2.573 sample warga binaan, dengan 40 hasil positif;
 - 888 sample pegawai, dengan hasil 0 positifhal ini menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.
 - 3) Pemindahan narapidana telah dilaksanakan sebagai langkah mitigasi gangguan keamanan dan penguatan manajemen risiko penghuni berisiko tinggi.
- e. Pembimbingan kemasyarakatan
 - 1) Pembinaan terhadap klien pemasyarakatan dilaksanakan melalui dukungan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan 4 Pos BAPAS di Bali
 - 2) Kinerja penelitian kemasyarakatan (Litmas) menunjukkan capaian positif, yaitu:



- Litmas Dewasa: 735 penyelesaian;
- Litmas Anak: 81 penyelesaian.

Capaian ini mendukung proses peradilan, pembinaan, serta pengambilan keputusan berbasis asesmen sosial kemasyarakatan.

f. Isu strategis bidang pemasyarakatan

Tingkat overcrowding pada Bali sebesar 77,68%, dengan kapasitas hunian 2.693 orang dan jumlah penghuni 4.785 orang. Kondisi ini masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pembangunan Lapas dan Sel baru, optimalisasi program integrasi, dan kebijakan pemidanaan alternatif. Selain itu, belum optimalnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang seharusnya dilaksanakan melalui siklus pembinaan narapidana yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berbasis asesmen terintegrasi, meliputi tahap penerimaan, asesmen, penempatan, pembinaan, evaluasi, hingga pengeluaran. Setiap tahapan tersebut didukung oleh kegiatan manajemen kasus, pengelolaan keamanan, pelayanan kesehatan, serta evaluasi berbasis data yang berkelanjutan.

Karena target indikator telah terlampaui, tidak terdapat kendala yang berdampak pada tidak tercapainya target kinerja. Meskipun demikian, beberapa risiko tetap perlu diantisipasi, antara lain adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar-UPT, keterbatasan sarana dan prasarana pada beberapa satuan kerja, serta dinamika pelaksanaan kebijakan yang memerlukan penyesuaian secara cepat. Risiko tersebut berpotensi memengaruhi konsistensi kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan apabila tidak dikelola secara optimal.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali akan terus memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis, mengoptimalkan pengendalian mutu berbasis indikator



kinerja, serta memastikan tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pengawasan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara berkelanjutan.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 10 Indeks IKK.17.1 Kantor Wilayah Tahun 2026

SK 17.1. Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								
TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	-	3,4	-	-	4,28	-	-	125,8

Persentase Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah baru mulai ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2026. Oleh karena itu, pada Tahun 2024 dan 2025 belum terdapat target maupun realisasi yang dapat dijadikan dasar perbandingan. Pada Tahun 2026 ditetapkan target sebesar 3,4%, sedangkan realisasi mencapai 4,28%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 125,8%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah telah terlaksana secara optimal dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah khususnya di Kantor Wilayah Direkterota Jenderal Pemasyarakatan Bali telah berjalan dengan baik.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 11 Indeks IKK.17.1 Kantor Wilayah Tahun 2026

SK 17.1. Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah						
No	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	3,4%	3,5%	3,6%	3,7%

Berdasarkan data yang disajikan diatas, pada Triwulan II Tahun 2026 realisasi Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 4,28%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 maka realisasi Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah telah melampaui target pada tahun 2026 yakni sebesar 4,28%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Efektivitas pengendalian mutu jajaran pemasyarakatan di tingkat wilayah khususnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali menunjukkan capaian yang sangat memuaskan jika disandingkan dengan standar sasaran nasional yang berlaku. Melalui formulasi perhitungan terpadu yang menggabungkan nilai Pelaksanaan Laporan Program (PLP) dan Pencapaian Target Kinerja (PCT), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali telah berhasil menembus nilai Realisasi Akhir sebesar 4,28%. Angka riil ini secara meyakinkan melampaui batas nilai acuan standar target nasional yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan kerja, yaitu sebesar 3,4%.



5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan:

1. Analisis Kegagalan/ Hambatan:

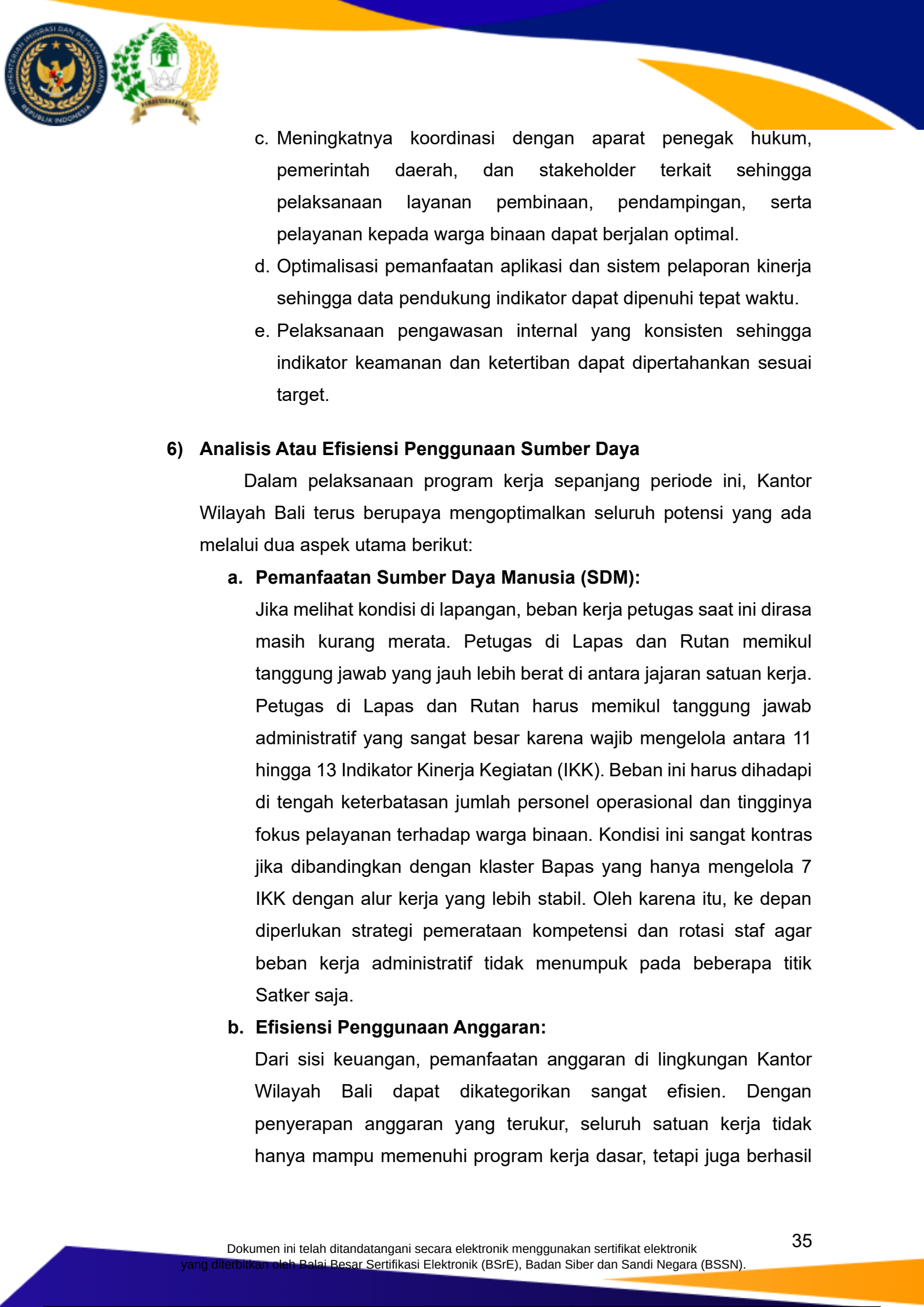
Meskipun realisasi sudah melampaui target yaitu 100%, namun masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu:

- Keterbatasan jumlah sasaran layanan, seperti warga binaan, tahanan, maupun anak binaan yang memenuhi persyaratan pada indikator tertentu.
- Belum optimalnya pelaksanaan beberapa program pembinaan, khususnya yang memerlukan kerja sama dengan pihak eksternal.
- Masih terdapat keterlambatan penyampaian data dukung dan proses validasi sehingga memengaruhi penyelesaian beberapa indikator kinerja.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pada beberapa unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal.

2. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Secara umum capaian kinerja seluruh satuan kerja berada pada kategori baik, dimana sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari tingginya nilai capaian pada berbagai indikator pembinaan, pelayanan, keamanan, dan pembimbingan kemasyarakatan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Terlaksananya perencanaan kegiatan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
- Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan program kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.



- c. Meningkatnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan layanan pembinaan, pendampingan, serta pelayanan kepada warga binaan dapat berjalan optimal.
- d. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan sistem pelaporan kinerja sehingga data pendukung indikator dapat dipenuhi tepat waktu.
- e. Pelaksanaan pengawasan internal yang konsisten sehingga indikator keamanan dan ketertiban dapat dipertahankan sesuai target.

6) Analisis Atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

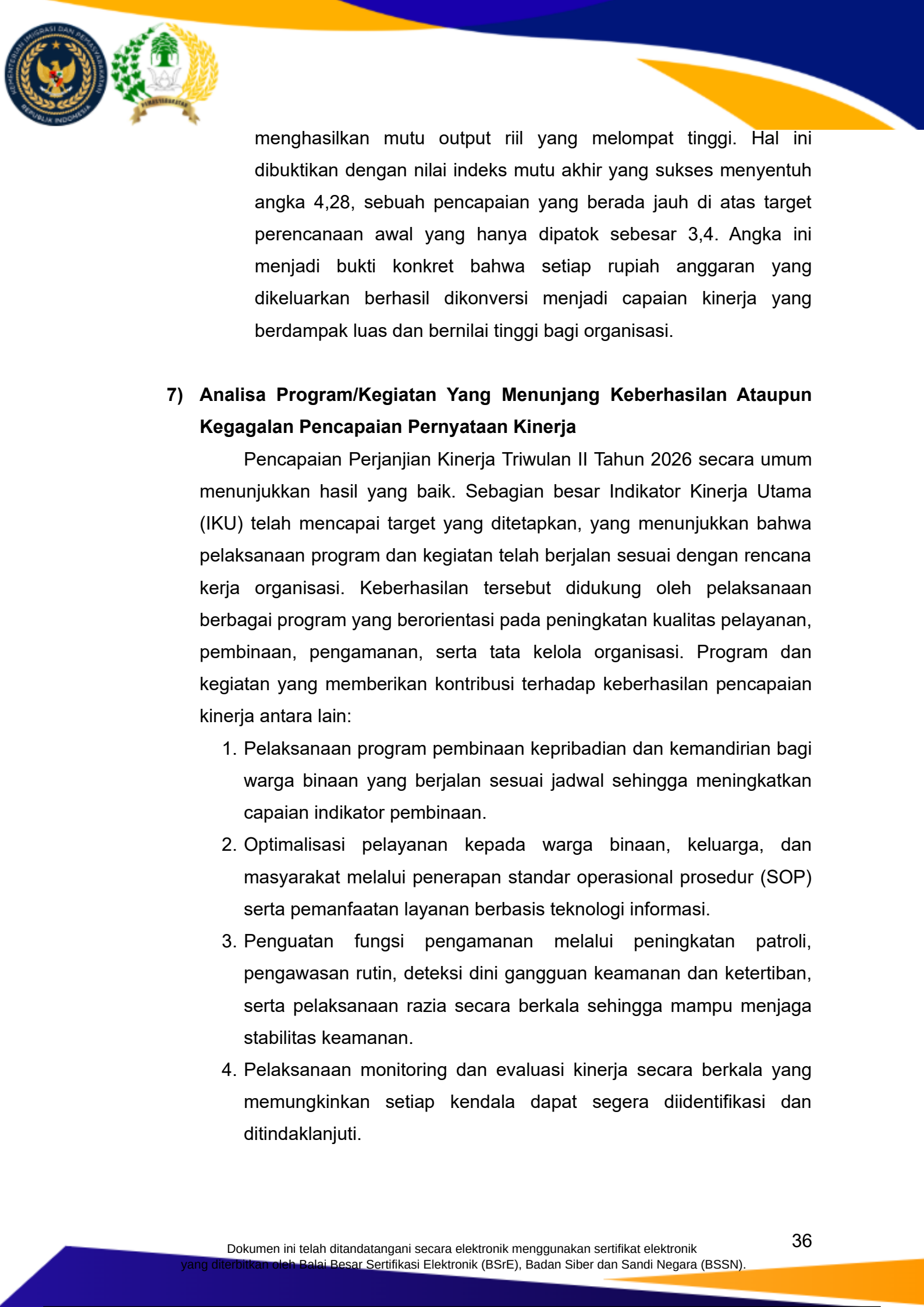
Dalam pelaksanaan program kerja sepanjang periode ini, Kantor Wilayah Bali terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi yang ada melalui dua aspek utama berikut:

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM):

Jika melihat kondisi di lapangan, beban kerja petugas saat ini dirasa masih kurang merata. Petugas di Lapas dan Rutan memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat di antara jajaran satuan kerja. Petugas di Lapas dan Rutan harus memikul tanggung jawab administratif yang sangat besar karena wajib mengelola antara 11 hingga 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Beban ini harus dihadapi di tengah keterbatasan jumlah personel operasional dan tingginya fokus pelayanan terhadap warga binaan. Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan klaster Bapas yang hanya mengelola 7 IKK dengan alur kerja yang lebih stabil. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi pemerataan kompetensi dan rotasi staf agar beban kerja administratif tidak menumpuk pada beberapa titik Satker saja.

b. Efisiensi Penggunaan Anggaran:

Dari sisi keuangan, pemanfaatan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Bali dapat dikategorikan sangat efisien. Dengan penyerapan anggaran yang terukur, seluruh satuan kerja tidak hanya mampu memenuhi program kerja dasar, tetapi juga berhasil



menghasilkan mutu output riil yang melompat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai indeks mutu akhir yang sukses menyentuh angka 4,28, sebuah pencapaian yang berada jauh di atas target perencanaan awal yang hanya dipatok sebesar 3,4. Angka ini menjadi bukti konkret bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan berhasil dikonversi menjadi capaian kinerja yang berdampak luas dan bernilai tinggi bagi organisasi.

7) Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencapai target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana kerja organisasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, pengamanan, serta tata kelola organisasi. Program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan yang berjalan sesuai jadwal sehingga meningkatkan capaian indikator pembinaan.
2. Optimalisasi pelayanan kepada warga binaan, keluarga, dan masyarakat melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi.
3. Penguatan fungsi pengamanan melalui peningkatan patroli, pengawasan rutin, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan razia secara berkala sehingga mampu menjaga stabilitas keamanan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala yang memungkinkan setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.



5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi terkait, serta mitra kerja dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan dan reintegrasi sosial.
6. Penguatan pengelolaan administrasi, pelaporan, dan validasi data kinerja sehingga proses pengukuran IKU dapat dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu.

Di samping keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa program atau kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan maksimal, antara lain:

1. Program pembinaan tertentu yang bergantung pada jumlah peserta atau warga binaan yang memenuhi persyaratan sehingga capaian indikator belum optimal.
2. Kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan pihak eksternal mengalami penyesuaian jadwal atau keterbatasan dukungan sehingga realisasi belum sesuai target.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pada beberapa kegiatan menyebabkan efektivitas pelaksanaan program belum maksimal.
4. Perubahan kondisi operasional dan dinamika jumlah warga binaan memengaruhi pencapaian beberapa indikator yang menggunakan data kuantitatif.
5. Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian data dukung dan proses validasi sehingga memengaruhi ketepatan pelaporan capaian kinerja.

B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, efektif, efisien, dan



akuntabel. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas organisasi, serta mendorong terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali secara konsisten melaksanakan berbagai rencana aksi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pelaksanaan rencana aksi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, peningkatan pengawasan internal, serta pengembangan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

Melalui pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan pemasarakatan yang semakin berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1) Capaian

Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan integritas aparatur pada satuan kerja yang berada di wilayah.

Capaian ini mencerminkan sejauh mana unit pelaksana di daerah telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan pada berbagai area perubahan, seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3. 12 Jumlah Pemenuhan Data Dukung RB Triwulan II Tahun 2026

No	Triwulan	Data Dukung yang Diminta	Data Dukung yang Terlaksana
1	Triwulan I	26	26
2	Triwulan II	39	39



Total	65	65
--------------	-----------	-----------

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berikut rincian perhitungan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan sebagai berikut :

- Realisasi

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{64}{64} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka, Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan yaitu 100%.

Keterangan:

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

- Capaian Kinerja

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$Capaian = 100 \%$$

Maka, Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan yaitu 100%



Tabel 3. 13 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2026 di Lingkup Kewilayahan

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	IKK 19.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan								
TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	100	100	-	100	100	-	100	100

Berdasarkan data indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan, target, realisasi, dan capaian Trwulan II pada Tahun 2025 dan 2026 masing-masing konsisten berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi telah berjalan optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Jika dibandingkan antar tahun, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan kinerja karena capaian sudah stabil di



tingkat maksimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan telah terlaksana secara konsisten, berkelanjutan, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pada Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali.

Tabel 3. 15 Perbandingan Target Jangka Menengah Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						
No	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	IKK 19.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas, pada Triwulan II tahun 2026 realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 realisasi indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan sama setiap tahunnya yakni 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional



Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup kewilayahan menunjukkan sejauh mana satuan kerja di wilayah tersebut mampu melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan target nasional. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali telah mampu merealisasikan dari target yang ditentukan, sehingga capaian kinerja menjadi 100%. Serta telah berhasil meraih Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja, serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali adalah sebagai berikut:

f. Analisis Kegagalan/ Hambatan

Meskipun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali telah berhasil mencapai target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain adanya perbedaan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Bali, terutama dalam memahami substansi Reformasi Birokrasi, pengisian aplikasi, serta penyampaian data dukung. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi di beberapa UPT turut memengaruhi kecepatan pengunggahan dokumen dan pelaporan capaian rencana aksi Reformasi Birokrasi. Koordinasi dan sinkronisasi antarbidang di lingkungan Kantor Wilayah maupun dengan seluruh UPT juga masih perlu terus diperkuat agar pelaksanaan kegiatan, penyampaian data, dan pemenuhan eviden dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan



Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali. Program tersebut meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi secara berkala kepada seluruh UPT Pemasarakatan di wilayah Bali guna memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan pendampingan dan asistensi kepada UPT dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi pelaporan yang terintegrasi. Upaya lainnya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, workshop, dan sosialisasi mengenai Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pemahaman serta kualitas pelaksanaan tugas. Keberhasilan juga didukung oleh penguatan koordinasi dan komunikasi antarbidang di lingkungan Kantor Wilayah bersama seluruh UPT Pemasarakatan se-Bali sehingga sinkronisasi program dan tindak lanjut hasil evaluasi dapat berjalan secara efektif. Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian pelaksanaan rencana aksi, pengelolaan data, dan pelaporan capaian telah meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

6) Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan terbatasnya jumlah petugas yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara optimal melalui dedikasi, kerja sama, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dapat dikategorikan efisien, terutama dalam mendukung pencapaian indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.



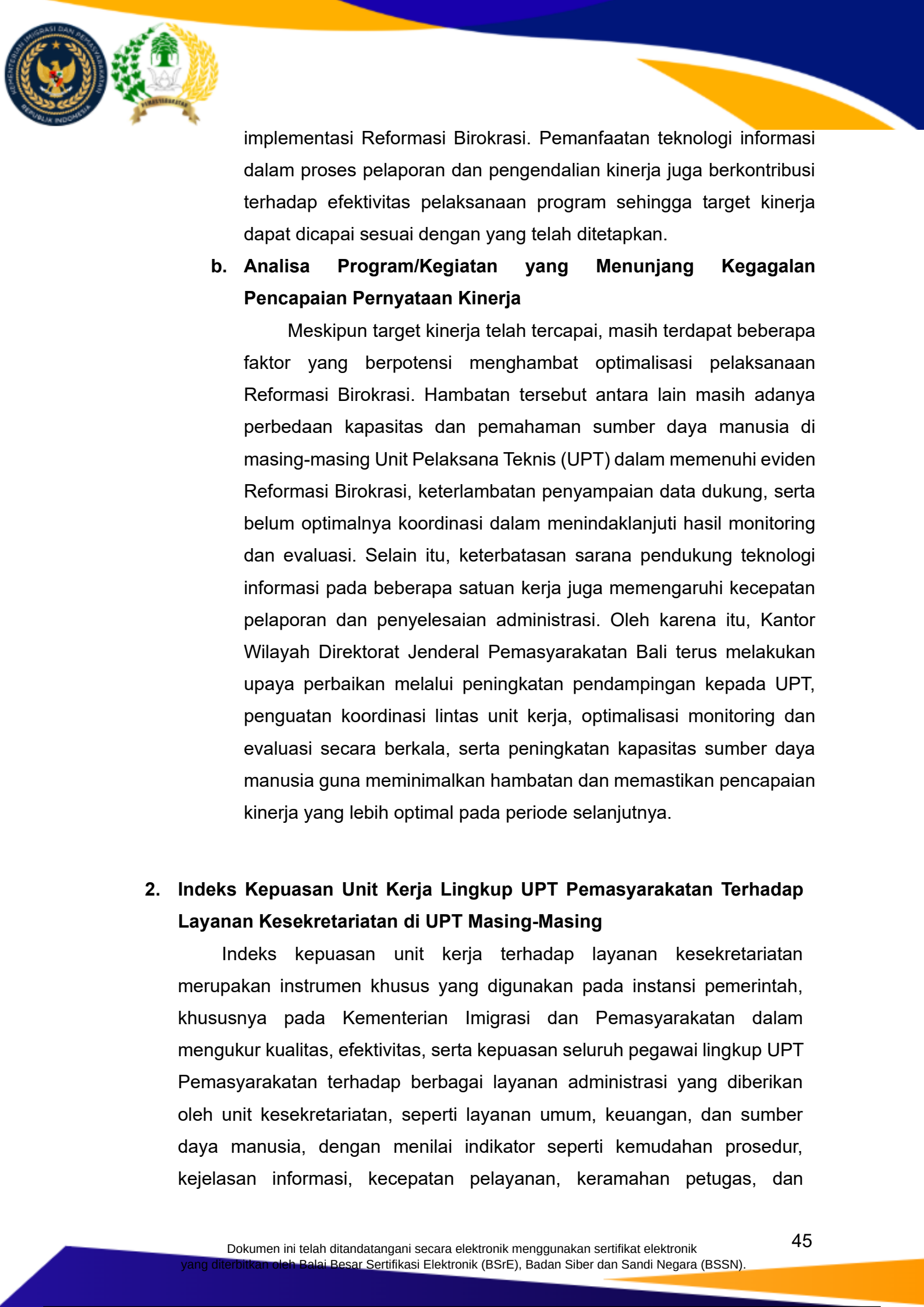
Dari sisi penggunaan anggaran, tidak terdapat alokasi anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi pencapaian indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan. Meskipun demikian, seluruh rencana aksi tetap dapat dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, koordinasi antarunit kerja, serta komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien karena target indikator tetap dapat dicapai tanpa memerlukan anggaran khusus.

7) Analisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Pernyataan Kinerja pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terencana serta dilaksanakan secara konsisten oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja diantaranya:

a. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian Pernyataan Kinerja pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan. Program tersebut meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi, penguatan koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di wilayah Bali, serta pendampingan dalam penyusunan dan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan secara berkelanjutan telah meningkatkan pemahaman aparatur terhadap



implementasi Reformasi Birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan dan pengendalian kinerja juga berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun target kinerja telah tercapai, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hambatan tersebut antara lain masih adanya perbedaan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam memenuhi eviden Reformasi Birokrasi, keterlambatan penyampaian data dukung, serta belum optimalnya koordinasi dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung teknologi informasi pada beberapa satuan kerja juga memengaruhi kecepatan pelaporan dan penyelesaian administrasi. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan pendampingan kepada UPT, penguatan koordinasi lintas unit kerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna meminimalkan hambatan dan memastikan pencapaian kinerja yang lebih optimal pada periode selanjutnya.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan merupakan instrumen khusus yang digunakan pada instansi pemerintah, khususnya pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam mengukur kualitas, efektivitas, serta kepuasan seluruh pegawai lingkup UPT Pemasarakatan terhadap berbagai layanan administrasi yang diberikan oleh unit kesekretariatan, seperti layanan umum, keuangan, dan sumber daya manusia, dengan menilai indikator seperti kemudahan prosedur, kejelasan informasi, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan



keadilan. Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Tabel 3. 16 Tabel Survei Kesekretariatan Trwiulan II Tahun 2026

NO	NAMA SATKER	NILAI SURVEI	JUMLAH RESPONDEN
1	LAPAS KEROBOKAN	3,60	142
2	LPP KEROBOKAN	3,98	75
3	LAPAS TABANAN	3,98	85
4	LAPAS KARANGASEM	3,80	79
5	LAPASTIK BANGLI	3,97	50
6	LAPAS SINGARAJA	4,00	83
7	RUTAN GIANJAR	3,95	64
8	RUTAN NEGARA	3,91	64
9	RUTAN KLUNGKUNG	4,00	67
10	RUTAN BANGLI	3,99	62
11	BAPAS DENPASAR	4,00	53
12	BAPAS KARANGASEM	4,00	24
13	LPKA	3,99	47
14	KANWIL BALI	4,00	89
TOTAL		55.17	984
TOTAL NILAI KESELURUHAN		3,94	

1) Capaian

Tingkat kepuasan Layanan Kesekretariatan Pada Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali diukur berdasarkan beberapa parameter, yaitu:

- Kompleksitas persyaratan layanan;
- Kejelasan informasi layanan;
- Kemudahan prosedur layanan;
- Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
- Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
- Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
- Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
- Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan



layanan;

- i. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
- j. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan

Tingkat kepuasan Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali terhadap layanan kesekretariatan diukur dengan menyebarkan kuisisioner melalui google form dan diisi oleh seluruh pegawai, pada link berikut:

https://docs.google.com/forms/d/1EtwlDx1t5Bo9tjptXKsFxqlvCgjlMwpqkU877V_On-l/edit dan berikut link rekapan survey seluruh UPT dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b-TkFMQ-_djAHfmhqwr-X4vcCu499qplJHe1bt61JQk/edit?usp=sharing :

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali adalah sebagai berikut:

Target: 3.52

Indeks Realisasi : 3,94

Sehingga capaian kinerja indikator pada Triwulan II 2026 dapat dihitung sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3,94}{3,52} \times 100\%$$

$$Capaian = 111,9\%$$

Maka, capaian kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing Masing yaitu 111,9%.



Tabel 3. 17 Tabel Indeks Kepuasan Unit Kerja

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	IKK 19.2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing- Masing	3,52	3,94	111,9%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan			SK 17.1. Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah					
TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	3,4	3,94	-	3,4	3,94	-	3,4	3,94

Berdasarkan data indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan, target kinerja pada tahun 2024 belum ada dikarenakan masih ada masa transisi Kementerian, pada tahun 2025 target kinerja memperoleh nilai 3,4 dan selanjutnya pada tahun 2026 realisasi yang dicapai juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 3,94. Pada tahun 2024 menjadi 3,98 pada tahun 2025 dan 3,99 pada tahun 2026. Jadi secara keseluruhan kinerja tetap sangat baik karena realisasi masih



melampaui target yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Semester Itahun 2026 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026-2029 pada Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali.

Tabel 3. 19 Perbandingan Target Jangka Menengah Indeks Kepuasan Unit Kerja Triwulan II Tahun 2026

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						
No	Indikator Kinerja	Target				
		2026	2026	2027	2028	2029
1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,94	4	4	4	4

Berdasarkan data yang disajikan diatas, pada Triwulan II tahun 2026 realisasi indikator Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali terhadap layanan kesekretariatan telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 3,94 indeks. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2026-2029 maka realisasi indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan tahun 2026 telah melampaui target pada tahun 2026 yakni sebesar 3,52 indeks.



4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional pada indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali menunjukkan sejauh mana layanan kesekretariatan di kantor wilayah mampu memenuhi kebutuhan internal pegawai dan mendukung kelancaran tugas administrasi. Standar nasional digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah layanan telah memenuhi persyaratan minimal terkait kepuasan pengguna internal, mencakup ketepatan waktu, akurasi dokumen, dan responsivitas terhadap permintaan. Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali telah mampu melampaui dari target yang ditentukan, sehingga realisasi 3.94 dari target yang ditentukan yaitu 3.52, serta capaian kinerja yaitu 111,9%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja, serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan pada Triwulan II Tahun 2026 yang melampaui target, dengan realisasi sebesar 4,00 dari target 3,94, didukung oleh meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan yang responsif, cepat, dan tepat sesuai kebutuhan pengguna layanan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dengan seluruh UPT, optimalisasi pelayanan administrasi, serta komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks kepuasan. Untuk mempertahankan capaian tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terus melakukan evaluasi kualitas layanan, menindaklanjuti masukan dari pengguna layanan,



meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembinaan dan pelatihan, serta mengembangkan inovasi pelayanan guna mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang semakin efektif, efisien, dan berkelanjutan.

b. Penyebab Kegagalan

Meskipun Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Hambatan tersebut antara lain masih adanya perbedaan kebutuhan dan ekspektasi layanan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT), keterlambatan penyampaian dokumen administrasi pada kondisi tertentu, serta belum meratanya pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan prima masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengguna layanan secara optimal.

6) Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indeks kepuasan yang melebihi target menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Penggunaan sumber daya manusia dioptimalkan melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan koordinasi antarbagian, serta penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan komunikasi dengan UPT turut mempercepat proses pelayanan tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Dengan demikian walaupun tidak terdapat pagu anggaran terkait layanan kesekretariatan target kinerja dapat dilampaui secara efektif dan tetap mengedepankan prinsip efisiensi serta akuntabilitas.



7) Analisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan administrasi kesekretariatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna layanan secara berkala, percepatan penyelesaian layanan administrasi, penguatan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh UPT Pemasarakatan di wilayah Bali, serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas di bidang pelayanan publik. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian layanan administrasi turut meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan pelayanan sehingga tingkat kepuasan unit kerja mengalami peningkatan.

b. Program/ Kegiatan yang Menunjang Kegagalan

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian sebagai upaya peningkatan kualitas layanan. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain adanya perbedaan ekspektasi pengguna layanan di masing-masing UPT, keterlambatan penyampaian dokumen administrasi pada kondisi tertentu, serta perlunya peningkatan kompetensi pegawai dalam menghadapi perkembangan sistem pelayanan berbasis digital. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali akan terus memperkuat evaluasi kualitas pelayanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyempurnakan standar operasional prosedur, serta mengembangkan inovasi pelayanan guna menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan pada periode berikutnya.



3.2 Capaian Program Aksi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden, Program Hasil Terbaik Cepat Presiden, serta Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah menetapkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Keputusan Menteri tersebut memuat 15 (lima belas) Program Aksi sebagai langkah strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Program Aksi Tahun 2026 dimaksud mencakup agenda strategis sebagai berikut:

1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tangga (RT);
7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
9. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
11. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;



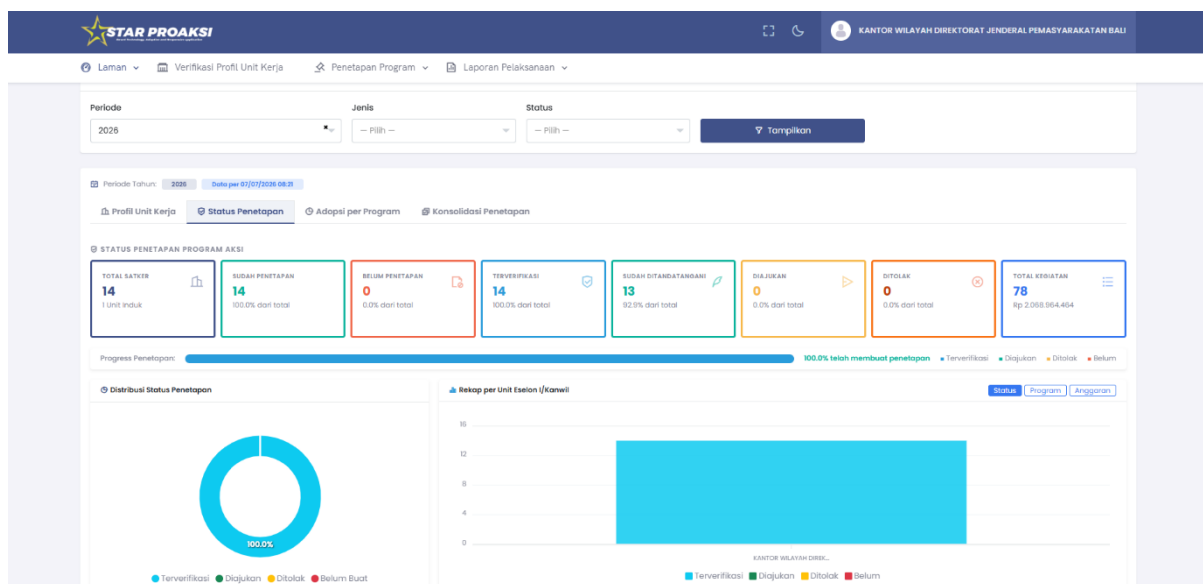
13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
14. Fasilitas Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam rangka memastikan implementasi 15 Program Aksi Menteri berjalan adaptif, terarah, dan sesuai kebutuhan lapangan, mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui 2 (dua) skema utama, yaitu:

- a. Skema Bottom Up Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengusulkan Program Aksi yang akan dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah kerja, kebutuhan layanan, potensi sumber daya, dan tantangan operasional masing-masing melalui Aplikasi STAR Proaksi. Usulan tersebut selanjutnya diverifikasi dan disetujui oleh Kantor Wilayah serta diketahui Unit Utama pembina sebagai bentuk pengendalian dan sinkronisasi kebijakan;
- b. Skema Top Down Unit Utama menetapkan Program Aksi tertentu kepada UPT sesuai arah kebijakan strategis kementerian, target nasional, serta karakteristik fungsi dan kapasitas masing-masing UPT, sehingga pelaksanaan program dapat lebih terarah, terukur, dan mendukung sasaran prioritas kementerian.



Melalui dua skema tersebut, implementasi Program Aksi diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan lapangan sekaligus menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan nasional secara berjenjang.



Gambar 3. 1 Dashboard STAR-Proaksi Penetapan Program Aksi

Adapun rincian capaian pelaksanaan Program Aksi tersebut sebagai berikut:

- jumlah satuan kerja pelaksana Program Aksi sebanyak 13 satuan kerja, yang berada dalam koordinasi 1 unit induk;
- dari total 13 satuan kerja dan, sebanyak 13 satuan kerja telah melakukan penetapan Program Aksi atau setara 100 persen;
- 13 satuan kerja penetapan Program Aksi yang telah disampaikan dinyatakan lulus verifikasi oleh Kantor Wilayah masing-masing dengan tingkat kelulusan 100 persen;
- dari 13 satuan kerja yang telah menetapkan Program Aksi, teridentifikasi 78 kegiatan pendukung Program Aksi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.068.964.464.

Adapun detail program dan kegiatan Program Aksi dari masing-masing satuan kerja dan 1 unit induk adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 20 Kegiatan Program Aksi Satuan Kerja

No	Satuan Kerja	Program Aksi	Kegiatan
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan;	Melaksanakan Tes Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.	Pelaksanaan MoU / Kerja Sama lintas sektor dalam upaya penanganan overcrowding
2.	Lapas Kelas IIA Kerobokan	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Lapas; b. Razia blok hunian di Lapas; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Lapas; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; b. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak Binaan; c. Optimalisasi Sistem



			Teknologi Informasi Masyarakat; d. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian;
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	a. Memperkuat layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan di Lapas,



			Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	a. Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Lapas; b. Razia blok hunian di Lapas; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Lapas; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; b. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak Binaan; c. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan;



			d. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian;
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan



		sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan
4.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan 2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Tes Urine serentak di Lapas; b. Razia blok hunian di Lapas; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Lapas; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba. a. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; b. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak Binaan; c. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan; d. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan



			kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian;
		4. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis	a. Pembangunan dapur sehat di Lapas; b. Pelatihan Keamanan Pangan Bersertifikat; c. Pelatihan Tata Boga bersertifikat; d. Premi/Upah Warga Binaan sebagai relawan dapur MBG; e. Penjualan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan pada Lapas.
		5. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal;
		6. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya



		Binaan	mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		7. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan
5.	Lapas Kelas IIB Singaraja	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Lapas; b. Razia blok hunian di Lapas; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Lapas; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; b. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak



			Binaan; c. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Masyarakat; d. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian;
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta



			peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan.
6.	Lapas Kelas IIB Tabanan	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Lapas; b. Razia blok hunian di Lapas; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Lapas; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; b. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak Binaan; c. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan;



			d. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian;
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan



		sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan.
7.	Lapas Kelas IIB Karangasem	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan 2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Tes Urine serentak di Lapas; b. Razia blok hunian di Lapas; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Lapas; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba. a. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; b. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak Binaan; c. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan; d. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan



			kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian;
		4. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis	a. Pembangunan dapur sehat di Lapas; b. Pelatihan Keamanan Pangan Bersertifikat; c. Pelatihan Tata Boga bersertifikat; d. Premi/Upah Warga Binaan sebagai relawan dapur MBG; e. Penjualan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan pada Lapas.
		5. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal;
		6. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya



		Binaan	mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		7. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan
8.	LPKA Kelas II Karangasem	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Lapas; b. Razia blok hunian di Lapas; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Lapas; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; b. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak



			Binaan; c. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Masyarakat; d. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian;
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta



			peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan.
9.	Rutan Kelas IIB Klungkung	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Rutan; b. Razia blok hunian di Rutan; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Rutan; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pelaksanaan MoU / Kerja Sama lintas sektor dalam upaya penanganan overcrowding; b. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; c. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak



			Binaan; d. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Masyarakat; e. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian.
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM local;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta



			peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan.
10.	Rutan Kelas IIB Gianyar	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Rutan; b. Razia blok hunian di Rutan; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Rutan; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pelaksanaan MoU / Kerja Sama lintas sektor dalam upaya penanganan overcrowding; b. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; c. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak



			Binaan; d. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Masyarakat; e. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian.
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM local;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta



			peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan.
11.	Rutan Kelas IIB Bangli	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Rutan; b. Razia blok hunian di Rutan; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Rutan; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pelaksanaan MoU / Kerja Sama lintas sektor dalam upaya penanganan overcrowding; b. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; c. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak



			Binaan; d. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Masyarakat; e. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian.
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM local;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta



			peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan.
12.	Rutan Kelas IIB Negara	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	a. Tes Urine serentak di Rutan; b. Razia blok hunian di Rutan; c. Penyelenggaraan Pengawasan Komunikasi melalui Wartelsuspas pada Rutan; d. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; e. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	a. Pelaksanaan MoU / Kerja Sama lintas sektor dalam upaya penanganan overcrowding; b. Pemenuhan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak binaan; c. Pemenuhan Hak Remisi dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak



			Binaan; d. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Masyarakat; e. Pemerataan persebaran narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan dan perikanan; c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian.
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	a. Bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); b. Produk hasil pembinaan Warga Binaan dapat masuk ke rantai pasok UMKM local;
		5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya mencegah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Narapidana melalui perluasan akses serta



			peningkatan mutu pendidikan di Lapas, Rutan, dan LPKA.
		6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas, Rutan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan.
13.	Bapas Kelas I Denpasar	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	Tes Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	Penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dalam rangka implementasi KUHP dan KUHP
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian.
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan)
14.	Bapas Kelas II Karangasem	1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai	Tes Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA



		modus di Lapas dan Rutan	
		2. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	Penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dalam rangka implementasi KUHP dan KUHP
		3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)	a. Program pertanian, peternakan dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; b. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian.
		4. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan)

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI					
#	Unit Kerja	Sesuai	Sebagian	Tidak Sesuai	Penetapan
1	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI	14	0	0	0
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN	6	0	0	0
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA	6	0	0	0
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANG ASEM	7	0	0	0
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TABANAN	6	0	0	0
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGU	7	0	0	0
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN	6	0	0	0
8	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IIA KARANGASEM	6	0	0	0
9	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG	6	0	0	0
10	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GIANYAR	6	0	0	0
11	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGU	6	0	0	0
12	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA	6	0	0	0
13	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR	4	0	0	0
14	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARANG ASEM	4	0	0	0

Gambar 3. 2 Dashboard konsolidasi penetapan Program Aksi



Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa progres pelaksanaan Program Aksi Tahun 2026 pada seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penetapan Program Aksi telah terlaksana secara optimal. Kegiatan yang diinput pada penetapan Program Aksi di setiap satuan kerja telah sesuai dan terhubung dengan rekomendasi kegiatan otomatis yang tertaut pada masing-masing program (data dukung program), sehingga menunjukkan kesesuaian antara perencanaan program dengan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja telah menyusun perencanaan program secara komprehensif, terstruktur, dan selaras dengan mekanisme penetapan Program Aksi, sehingga diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, pencapaian target kinerja organisasi, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Aksi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.

Berdasarkan pelaksanaan Program Aksi pada 13 (tiga belas) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali periode Triwulan II, telah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Pelaksanaan Program Aksi di 13 UPT Pemasyarakatan Bali

No	Program Aksi	Keterangan
1.	Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan Berbagai Modus di Lapas dan Rutan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis telah melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba serta penyalahgunaan alat komunikasi melalui pelaksanaan tes urine secara berkala, razia blok hunian, pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspas, pemindahan narapidana kategori high risk sesuai ketentuan, serta optimalisasi program rehabilitasi bagi Warga Binaan penyalahguna narkotika, Adapun hasil yang diperoleh diantaranya: • Upaya Penggagalan Penyelundupan: 1



		• Pelaksanaan pengeledahan: 324 kegiatan • Hasil Pengeledahan: - HP: 71 buah - Senjata Tajam: 378 buah - Barang Elektronik: 231 buah - Narkoba: 380 paket • Jumlah pelaksanaan Tes Urine: 35 kegiatan • Hasil tes urine: - Pegawai positif: - - Pegawai negatif: 874 orang - Narapidana positif: 32 orang - Narapidana negatif: 2356 orang - Tahanan positif: - - Tahanan negatif: 171 orang • Jumlah Wartelsus yang tersedia: 177 unit • Jumlah pendapatan Wartelsus: Rp. 279.869.816
2.	Mengatasi Permasalahan Overcapacity dan Overcrowding dengan Solusi yang Komprehensif	Upaya penanganan overcapacity dan overcrowding telah dilaksanakan melalui percepatan pemberian hak integrasi, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana, pemerataan persebaran narapidana melalui mekanisme pemindahan antar-UPT. Adapun hasil yang diperoleh diantaranya: • Jumlah Distribusi Pemindahan Dalam Wilayah: 125 orang
3.	Kemandirian Pangan melalui Program Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	Program ketahanan pangan telah dilaksanakan melalui pengembangan kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai potensi masing-masing UPT dengan memanfaatkan lahan produktif yang tersedia. Pelaksanaan program didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok tani, maupun



		pihak ketiga dalam penyediaan bibit, pupuk, pakan, dan sarana produksi lainnya. Adapun hasil yang diperoleh diantaranya: • Hasil panen pertanian: - Kacang Panjang: 14 kg - Kangkung: 106 kg - Asparagus: 225 kg - Sawi: 260 kg - Pokcoy: 538 kg - Singkong: 7 kg
4.	Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan melalui Koperasi dan UMKM	Program ketahanan pangan telah dilaksanakan melalui pengembangan kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai potensi masing-masing UPT dengan memanfaatkan lahan produktif yang tersedia. Pelaksanaan program didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok tani, maupun pihak ketiga dalam penyediaan bibit, pupuk, pakan, dan sarana produksi lainnya. Adapun produk hasil karya WBP diantaranya: • Makanan - Keripik - Roti - Gorengan • Jasa - Laundry - Potong Rambut - Percetakan/Sablon - Cuci Kendaraan - Las • Kerajinan Tangan • Kerajinan Kertas • Kerajinan kayu



5.	Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan	Pelaksanaan pendidikan kesetaraan terus diperkuat melalui penyediaan layanan pendidikan formal maupun nonformal bagi Narapidana dan Anak Binaan. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi pendidikan dan lembaga terkait guna memberikan kesempatan kepada Warga Binaan untuk memperoleh pendidikan yang layak, meningkatkan kompetensi, serta mempersiapkan proses reintegrasi sosial setelah selesai menjalani masa pidana. Adapun hasil yang diperoleh diantaranya: • Jumlah Penerima Pendidikan Kejar Paket: - Paket A: 10 orang - Paket B: 29 orang - Paket C: 31 orang
6.	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial bagi Masyarakat	UPT telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial kepada masyarakat sekitar melalui optimalisasi pelayanan klinik pemasyarakatan, penyediaan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan dasar, edukasi kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya. Adapun hasil yang diperoleh diantaranya: • Penerima Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis - Pemeriksaan umum: 422 orang • Bakti Sosial - Paket sembako: 219 paket - Makanan: 55 porsi - Beras: 35 kg - Telur: 8 kerat

Sehubungan dengan hasil capaian penetapan Program Aksi yang telah mencapai 100%, diperlukan langkah tindak lanjut sebagai berikut:



- a. memastikan konsistensi pelaksanaan seluruh kegiatan pendukung Program Aksi sesuai dengan jadwal, target, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pelaksanaan Program Aksi beserta pemenuhan data dukung laporan pelaksanaan pada Aplikasi STAR-Proaksi guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja dalam penyelesaian kendala teknis maupun administratif selama pelaksanaan Program Aksi, sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Pengendalian berkala oleh pimpinan unit guna memastikan seluruh target dan implementasi Program Aksi Tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu, terukur, dan berdampak nyata.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali juga melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan penguatan pelaksanaan tugas serta fungsi pemsarakatan. Berbagai kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan bakti sosial sebagai wujud kepedulian sosial kepada masyarakat, kegiatan donor darah dalam rangka mendukung program kemanusiaan, serta Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di bidang pembinaan dan pengamanan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali juga melaksanakan pemindahan narapidana secara terencana dan sesuai prosedur untuk mendukung optimalisasi pembinaan, pemerataan hunian, serta peningkatan aspek keamanan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan. Selain itu, secara berkelanjutan dilaksanakan pengeledahan kamar hunian dan tes urine kepada warga binaan pemsarakatan maupun petugas sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban serta upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Lembaga Pemasarakatan dan Rumah



Tahanan Negara. Kegiatan tersebut merupakan implementasi komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan Lapas dan Rutan yang bersih dari narkoba, telepon genggam ilegal, pungutan liar, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Di samping itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali turut mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan panen raya hasil kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wujud keberhasilan program pembinaan, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan keterampilan, produktivitas, dan kemandirian warga binaan. Berbagai capaian tersebut menunjukkan komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dalam mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- a. Soft Entry Meeting
Pemeriksaan BPK RI Atas
Laporan Keuangan
Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan Tahun
2025;



- b. Pelaksanaan Panen Raya
Serentak UPT
Pemasyarakatan Bali Tahun
2026;





- c. Donor Darah dalam rangka mendukung program kemanusiaan;



- d. Bakti sosial sebagai wujud kepedulian sosial kepada Masyarakat;



- e. Tes urine kepada warga binaan pemasyarakatan maupun petugas sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban;



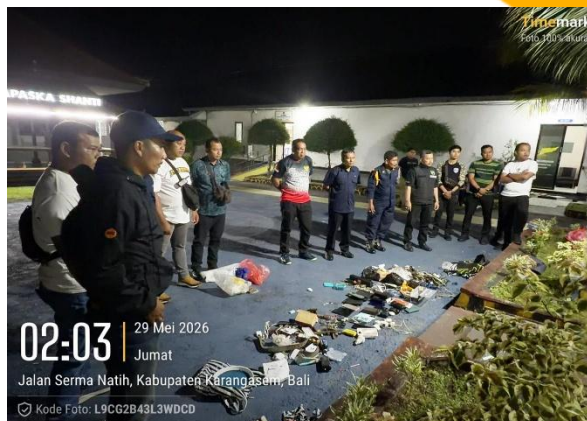
- f. Pemindahan narapidana secara terencana dan sesuai prosedur untuk mendukung optimalisasi pembinaan, pemerataan hunian, serta peningkatan aspek keamanan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan;





g. Penggeledahan kamar hunian kepada warga binaan pemasyarakatan maupun petugas sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban;

h. Ikut serta dalam rangka menyukseskan kegiatan WCPP yang diselenggarakan di Bali



3.4 Penghargaan/ Prestasi dan Inovasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berhasil menorehkan berbagai prestasi sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja. Salah satu capaian yang membanggakan adalah keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang merupakan pengakuan atas keberhasilan dalam membangun Zona Integritas melalui penerapan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Predikat tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional.

Selain itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali juga berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam



mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berkualitas.

Berbagai penghargaan yang telah diraih tersebut merupakan hasil sinergi, kerja keras, dan komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional. Ke depan, prestasi tersebut akan dijadikan sebagai motivasi untuk terus menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi, serta mempertahankan budaya kerja yang berintegritas guna mendukung tercapainya tujuan organisasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan.

- a. Meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025



- b. Meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Tahun Anggaran 2025





**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB IV PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali telah menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, didukung oleh penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Capaian pada indikator-indikator kinerja menunjukkan hasil yang baik, antara lain nilai Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yang mencerminkan keberhasilan pembinaan dan pengendalian terhadap 13 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Bali. Selain itu, indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kualitas layanan kesekretariatan, serta berbagai kegiatan pendukung seperti pelaksanaan bakti sosial, donor darah, entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemindahan narapidana, panen raya hasil pembinaan, serta pelaksanaan tes urine dan penggeledahan di Lapas/Rutan turut mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pamasarakatan.

Keberhasilan tersebut juga diperkuat dengan diraihnya Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 dan penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Tahun Anggaran 2025, yang menjadi bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penyempurnaan dalam beberapa aspek, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.



4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali perlu terus memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan secara berkala, sehingga setiap kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Penguatan koordinasi dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program serta ketepatan penyampaian data dan pelaporan kinerja.

Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan, implementasi Reformasi Birokrasi, serta penguatan pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja juga perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi.

Dengan komitmen seluruh jajaran serta dukungan para pemangku kepentingan, diharapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mampu mempertahankan berbagai prestasi yang telah diraih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencapai seluruh sasaran strategis dan target kinerja Tahun 2026 secara optimal sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

TAHUN 2026

LAMPIRAN





LAMPIRAN

Lampiran Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali Triwulan II Tahun 2026 memuat dokumen pendukung utama yang menjadi dasar penguatan akuntabilitas, transparansi, dan keterukuran kinerja organisasi, yang terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
2. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026;
3. Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026.

Untuk memudahkan akses dan penelusuran informasi, dokumen lampiran dapat diunduh dan ditinjau melalui tautan berikut:



<https://bit.ly/LampiranLaporanCapaianKinerjaKanwilDitjenpasBaliTWIITA2026>